

## **BAB II**

### **PERSPEKTIF TEORITIS**

Pada bab II ini, peneliti memaparkan mengenai beberapa penjelasan tentang teori-teori terkait topik yang peneliti bahas. Teori-teori yang didapat terdiri dari berbagai sumber baik itu dari penelitian terdahulu maupun pendapat dari para ahli yang terdapat dalam buku maupun jurnal penelitian, antara lain; peran gender (*gender role*), film dan kaitannya dengan konstruksi peran gender, pembagian kerja antara suami-istri dalam keluarga, serta metode *reception analysis* (analisis penerima khalayak aktif).

#### **II.1. Konsep Peran Gender**

Kata gender sendiri merupakan kata yang dipinjam dari bahasa Inggris, sehingga apabila dilihat dalam kamus tidak secara jelas dibedakan definisi antara kata *sex* dan *gender* (Fakih, 2013:7). Menurut Fakih, untuk memahami mengenai konsep gender maka harus dibedakan terlebih dahulu antara kata gender dan seks. Oakley (dikutip dalam Nugroho 2011) mengatakan bahwa ‘gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen sehingga berbeda dengan pengertian gender.’ Hal yang sama juga dijelaskan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia yang mengartikan gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat (Nugroho, 2011:4).

Dari beberapa definisi di atas kata yang perlu digaris bawahi ialah konstruksi, yang berarti gender merupakan suatu hal yang lahir dan

berkembang dalam pemikiran masyarakat. Fakhri (2013:9) mengatakan bahwa :

‘sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara.’

Oleh karena itu Fakhri (2013:9) menambahkan melalui proses panjang inilah sosialisasi gender akhirnya dianggap sebagai suatu ketentuan Tuhan, yang berarti perbedaan-perbedaan gender dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Selain itu jika dilihat lebih dalam lagi, permasalahan mengenai gender ini mulai muncul dari adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang berarti perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender.

Kondisi ini yang mengakibatkan pemikiran mengenai ketidakadilan gender telah mengakar mulai dari keyakinan masing-masing orang, keluarga, hingga pada tingkat negara yang bersifat global (Nugroho, 2011:18). Berawal dalam kehidupan keluarga, yang mana orang tua bertanggungjawab penuh untuk mengajarkan kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan mengenai gender. Orang tua dalam hal ini menjadi panutan atau contoh bagi anak untuk belajar mengenai gender. Pada umumnya seorang ibu akan lebih cenderung membangun kedekatan dengan anak perempuan daripada anak laki-laki (Wood, 2005:151).

Sigmund Freud (dalam Wood, 2005:150) berpendapat pada usia dini anak laki-laki dan perempuan akan mengidentifikasi diri mereka melalui orang tua masing-masing. Freud berpendapat bahwa ‘ *that girls regard their mothers are responsible for their lack of penises, whereas boys view their fathers as having the power to castrate them. Both children see*

*the father and the penis as power*', yang berarti anak laki-laki dan perempuan melihat ayah dan ibu mereka bertanggungjawab atas jenis kelamin yang dimiliki oleh keduanya. Dalam hal ini baik anak laki-laki dan perempuan melihat seorang ayah dengan alat kelaminnya (penis) dinilai sebagai seorang yang memiliki kekuatan sedangkan seorang ibu yang tidak memiliki alat kelamin demikian dianggap sebagai kebalikannya yakni tidak memiliki kekuatan.

Namun, pendapat dari Freud tersebut justru dibantah oleh beberapa ahli lainnya Bassow, 1992; Pleck, 1981; Williams, 1973 (dalam Wood, 2005:150) yang menjelaskan perempuan tidak merasa iri terhadap alat kelamin yang dimiliki oleh laki-laki, namun yang menjadi permasalahan di sini ialah alat kelamin (penis) tersebut dijadikan lambang dari *power* atau kekuatan seorang laki-laki. Oleh karena itu sering kali perbedaan jenis kelamin inilah yang memicu terjadinya perbedaan gender dalam masyarakat sehingga perbedaan genderpun dinilai sebagai suatu hal yang merupakan kodrat dari Tuhan.

Dilain pihak, Moose (2007:3) menjelaskan dalam sebuah studi laboratorni mengenai gender, kaum ibu diajak untuk bermain bersama bayi orang lain yang adalah bayi laki-laki dan perempuan. Ketika seorang bayi laki-laki didekatkan kepada mereka maka kaum perempuan akan menanggapi bayi dengan aksi fisik dan permainan. Sedangkan ketika yang didekatkan pada mereka adalah bayi perempuan maka reaksinya berbeda yakni menenangkan dan menghibur bayi perempuan tersebut, sehingga dapat dikatakan sejak usia kecil anak-anak telah merespon menurut stereotipe gender yang pada akhirnya terbawa hingga masa dewasa kemudian akan berlanjut terus hingga generasi selanjutnya.

Sementara itu, Fakih (2013:12-13) mengatakan perbedaan gender tidak akan menjadi sebuah permasalahan apabila tidak menimbulkan ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penyebab ketidakadilan dalam gender tersebut ialah sistem dan struktur sehingga keduanya yakni laki-laki dan perempuan, menjadi korban dalam sistem ini. Lebih dalam lagi Fakih menjelaskan ketidakadilan gender ini terjadi melalui berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, adanya stereotype atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran.

Beberapa bentuk ketidakadilan gender tersebut pada akhirnya merambah hingga ke ranah pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh Sugihastuti dan Saptiawan (2010:55) ‘perempuan dijauhkan dari pekerjaan tertentu karena dianggap kurang mampu melakukannya bahkan bila aktivitas itu membutuhkan kekuatan fisik.’ Anggapan dalam masyarakat jika laki-laki selalu kuat dan perempuan penakut, laki-laki agresif dan perempuan pasif serta laki-laki bekerja dan perempuan mengasuh anak (Sugihastuti & Saptiawan, 2010:50) membuat perempuan jarang mendapat kesempatan untuk melakukan pekerjaan pada wilayah publik atau di luar rumah.

Kuntjara (2012:154) juga mengatakan demikian ‘seorang pemimpin dalam dunia kerja, kepala negara, pemimpin kerajaan, pemimpin organisasi, dan lain-lain sering kali adalah laki-laki.’ Sayangnya, meskipun telah mengurus begitu banyak pekerjaan domestik dengan menghidupi keluarganya, kaum perempuan jarang menerima pengakuan, hak, dan kekuasaan yang sama seperti kepala keluarga laki-laki (Moose, 2007:56). Menurut penjelasan yang disampaikan dalam Kuntjara (2012:154-158),

peneliti menemukan bahwa kalahnya perempuan dalam bidang pekerjaan publik terdiri dari berbagai alasan, diantaranya motivasi diri yang rendah, kekhawatiran untuk berhasil, kemampuan yang rendah, serta faktor eksternal seperti selalu berusaha merendahkan diri apabila telah berhasil dalam bidang tertentu.

Beberapa alasan yang dijelaskan Kuntjara tampaknya telah berkembang dari waktu ke waktu sehingga semakin menguatkan stereotipe dalam masyarakat. Perempuan masih sering mendapat penolakan ketika hendak melakukan pekerjaan publik yang masih didominasi oleh laki-laki. Apabila perempuan memasak untuk keperluan domestik, maka berbeda dengan laki-laki yang jika ia memasak akan dipuji sebagai seorang koki profesional (Sugihastuti & Saptiawan, 2010:57-58). Keadaan ini justru membuat laki-laki selalu merasa berkuasa baik dalam dunia pekerjaan publik maupun domestik (Sugihastuti & Saptiawan, 2010:85).

Masyarakat selalu identik dengan stereotipe perempuan, yang mana perempuan hanyalah pencari nafkah nomor dua karena sudah ada suami yang dianggap pencari nafkah utama dalam keluarga (Nugroho, 2011:139). Anggapan masyarakat bahwa tugas utama perempuan adalah melayani suami. Hal ini memang sesuatu yang wajar, namun bukan berarti mengekang kebebasan kaum perempuan dalam berkarya di dunia publik terutama dalam bidang pendidikan (Nugroho, 2011:12). Fakih (2013:94) menambahkan pembagian kerja secara seksual merupakan suatu usaha melambangkan ketergantungan antarjenis kelamin yang sesungguhnya menguntungkan pihak laki-laki saja. Gardiner, dkk (1996:234) mengatakan 'pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa tempat perempuan di rumah. Perempuan bukanlah pencari nafkah karena yang mencari nafkah adalah laki-laki atau suami.'

Berbagai anggapan yang beredar luas dalam masyarakat mengenai stereotipe perempuan dilihat sebagai salah satu tindakan yang sangat merugikan posisi kaum perempuan dan justru hal ini sering kali dianggap benar (Fakih, 2013:74). Kekalahan fisik dan mental perempuan dari laki-laki juga menjadi satu dari sekian banyak alasan mengapa perempuan sulit mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki serta masih selalu menjadi korban dari tindak kekerasan. Fakih (2013:75) mengatakan ‘kaum perempuan secara fisik lemah dan laki-laki umumnya lebih kuat maka hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut mendorong laki-laki boleh dan bisa seenaknya memukul dan memperkosa perempuan.’

Umumnya, ketika terjadi tindak kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan masyarakat masih beranggapan kuat apabila kejadian ini bukan seratus persen kesalahan dari pihak laki-laki melainkan ada unsur kesengajaan dari pihak perempuan. Kaum perempuan memakai pakaian yang minim serta berdandan yang berlebihan (Nugroho, 2011:13-14) sehingga memancing kaum laki-laki untuk menggoda perempuan tersebut. Posisi kaum perempuanpun kian tersudutkan dengan begitu banyak stereotipe yang melekat dalam benak masyarakat luas. Dalam sebuah keluarga, hubungan gender justru menuntut perempuan harus mendahulukan kebutuhan laki-laki sebelum memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri (Moose, 2007:157).

Puspitawati (2012:2) menjelaskan masyarakat yang hidup dalam budaya patriarki akan menafsirkan perbedaan biologis sebagai indikator kepantasan dalam berperilaku yang berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol, dan menikmati manfaat dari sumber daya dan informasi. Oleh karena itu tuntutan peran, tugas, dan kewajiban yang pantas dilakukan

laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh keduanya sangat bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Oleh karena itu, Puspitawati menambahkan ada masyarakat yang terlihat sangat kaku membatasi peran yang pantas dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, salah satunya tabu bagi seorang laki-laki masuk ke dapur atau menggendong anak begitu juga perempuan yang tidak diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja.

Siregar, dkk (1999:436) menjelaskan pembagian kerja secara seksual sebenarnya juga merugikan pihak laki-laki. Tetapi, dampak yang paling dirasakan ialah pada kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena hanya laki-laki yang mendapat peran lebih besar dan memiliki pengaruh dalam setiap bidang kehidupan. Kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki inilah yang pada akhirnya membuat mereka merasa perlu untuk memberikan sejumlah aturan pada perempuan, mulai dari urusan pekerjaan hingga pada cara berpakaian. Selanjutnya, Siregar menambahkan dalam urusan perasaan dan emosi, perempuan selalu diletakkan sebagai makhluk terbelakang sehingga ada semacam pemakluman apabila perempuan dikatakan cengeng, bodoh, penakut, serta tidak rasional.

Dari serentetan permasalahan mengenai ketidakadilan gender ini, maka perlu dilakukan berbagai usaha untuk menyuarakan kesamaan hak, kewajiban, peran serta tanggungjawab baik antara laki-laki maupun perempuan sehingga tidak hanya merugikan salah satu pihak saja dalam hal ini ialah perempuan. Menurut Fakih (2013:8) konsep gender sendiri merupakan suatu sifat yang melekat dalam diri laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan baik secara sosial maupun kultural.

Oleh karena itu ciri dari sifat ini dapat dipertukarkan, misalnya selama ini perempuan selalu identik dengan lemah lembut, keibuan serta

emosional. Sementara laki-laki dianggap kuat, tegas, dan perkasa namun yang terjadi bisa sebaliknya ada juga laki-laki yang emosional, lemah lembut bahkan bersifat keibuan. Sama halnya dengan perempuan ada juga yang kuat, rasional dan perkasa.

Merujuk pada pendapat yang disampaikan Fakih, maka dalam masalah pekerjaanpun sebenarnya bisa dijalankan oleh laki-laki dan perempuan baik itu pekerjaan domestik maupun publik sehingga laki-laki bisa mendapat kesempatan untuk merasakan bagaimana mengurus pekerjaan rumah dan perempuan juga bisa melakukan pekerjaan kantor di luar rumah. Menurut Puspitawati (2012:2) sebagian masyarakat ada yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan bebas melakukan aktivitas sehari-hari, seperti perempuan diperbolehkan bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan laki-laki sebagian besar menyabung ayam.

Puspitawati (2012:4) menjelaskan penyebab dari ketimpangan gender ialah adanya budaya patriarki dalam masyarakat. Laki-laki selalu mendapat hak istimewa sehingga tujuan utama dari arah gerakan feminis yakni penghapusan sistem patriarki yang kian berkembang. Hal serupa diungkapkan oleh Murniati (2004:63) 'dalam struktur patriarki seperti sekarang ini, perempuan tidak akan dapat merdeka kalau tidak diberi kesempatan oleh laki-laki.' Murniati mengatakan kesempatan yang diinginkan oleh kaum perempuan bukan saja menyangkut status dan peranan, melainkan hak, karena apabila hak-hak perempuan dapat diakui sejajar dengan laki-laki maka perempuan boleh bebas dalam mengembangkan diri. Salah satunya seperti yang tergambar dalam film Erin Brockovich, dengan menampilkan sisi seorang perempuan yang bisa melakukan pekerjaan di dunia publik (bekerja kantoran) dan laki-laki yang juga bisa mengurus dan mengasuh anak-anak dalam rumah tangga.

## **II.2. Film dan Konstruksi Peran Gender**

Sebagai salah satu media massa, keberadaan film tentu memiliki fungsi dan peranan tersendiri bagi masyarakat. Lebih lanjut definisi mengenai film dikemukakan oleh Charles Wright (dalam Trianton, 2013:3) ‘film adalah media penyampaian warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga secara umum fungsi film dibagi dalam empat yakni sebagai alat hiburan, sumber informasi, alat pendidikan dan pencerminan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa.’ Selain itu Sobur (dalam Yanuar, 2014) mengatakan ‘film lebih merupakan konstruksi atau gambaran dari realitas, film membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan kode-kode, dan ideologi dari kebudayaannya.’ Yanuar (2014) juga mengatakan melalui sebuah film, seorang sutradara yang berperan selaku komunikator dapat menyampaikan berbagai ide, pesan serta gagasan kepada komunikan yakni penonton lewat jalan cerita yang ada dalam film tersebut.

Sementara itu definisi lain mengenai film juga disampaikan oleh Sumardijjati (2009) dalam penelitiannya, yang menjelaskan bahwa ‘film merupakan komunikasi melalui media massa modern. Film hadir sebagai bagian kebudayaan massa yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat perkotaan dan industri, sebagai bagian dari budaya massa yang populer.’

Sumardijjati (2009) juga mengatakan pemutaran sebuah film dapat berdampak pada perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, salah satu contohnya ialah adanya gaya berpakaian atau cara berdandan dari para aktor dan aktris dalam film tersebut yang kemudian diikuti oleh masyarakat yang menonton. Hal ini juga diperkuat oleh Fiske dalam penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2014) yang mengatakan ‘film memiliki kekuatan

dan kemampuan untuk menjangkau banyak segmen sosial, karena film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayak sosial.’

Dalam penelitiannya, Salmah (2014) menjelaskan ditinjau dari jenisnya film terdiri dari film dokumenter, film animasi, dan film berita, serta apabila ditinjau dari isinya maka film terdiri dari film *action*, film drama, film komedi dan film propaganda. Beberapa definisi mengenai film tentu membuat kita semakin mengetahui untuk apa film dibuat. Namun, di sisi lain tentu kita akan bertanya-tanya seperti apa sejarah film dari dulu hingga sekarang. Trianton (2013:9) mengatakan sejarah film ini cukup panjang sehingga perlu memakan waktu jika dijelaskan secara terperinci. Beliau menjelaskan film pertama kali diproduksi oleh dua bersaudara Louise dan Auguste Lumiere pada 28 Desember 1895 di Perancis. Dua bersaudara ini jugalah yang pada akhirnya memperkenalkan industri film ke layar lebar atau lebih dikenal dengan istilah bioskop.

Sementara itu, dalam industri perfilman Indonesia sendiri Trianton (2013:12) menjelaskan munculnya film pertama kali disebut dengan istilah *Gambar Idoep* yang dipertontonkan pada masyarakat di Betawi atau Batavia (sekarang Jakarta) tepatnya tanggal 5 Desember 1900. Perfilman Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dengan diadakannya pemutaran perdana sebuah film dokumenter mengenai peristiwa yang terjadi di Eropa dan Afrika serta kehidupan politik di Belanda. Pemutaran film perdana inipun dilakukan dalam bioskop. Perlu diketahui apabila pada zaman kolonial Belanda, Indonesia telah memiliki beberapa bioskop yang didirikan oleh Belanda. Namun, pada saat itu bioskop di Indonesia masih dibedakan berdasarkan ras.

Kemunculan film menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas. Pada awalnya, film hanya dijadikan sebagai alat hiburan semata

artinya masyarakat menonton sebuah film hanya ingin memperoleh kesenangan saja (Trianton, 2013:22). Sama halnya yang diungkapkan oleh Nurudin (2011:69) ketika seseorang lelah dengan aktivitas seharian, maka media massa seperti film, sinetron dan acara lainnya di televisi dapat dijadikan sebagai sarana hiburan sekaligus sarana untuk berkumpul bersama keluarga di rumah. Namun, bukan berarti di dalam film tidak memuat nilai serta pesan yang bisa didapat untuk refleksi kehidupan orang yang menonton.

Trianton (2013:14) melanjutkan penjelasannya bahwa dalam film juga tersimpan fungsi informatif, edukatif serta persuasif. Hal ini dibuktikan dengan ketika seorang menonton sebuah film, katakanlah film bertema sedih kemudian tiba-tiba ia merasa ikut terharu saat melihat adegan dalam film tersebut maka penonton tadi dapat dikatakan mampu mencerna cerita yang difilmkan juga memiliki kepekaan emosi. Trianton juga mengatakan 'penonton film yang baik adalah mereka yang mampu mencerna segala informasi dalam film'.

Berbicara mengenai film tentu tidak terlepas dari peranan pemain dalam film atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor (pemain laki-laki) dan aktris (pemain perempuan). Keterlibatan kaum perempuan dalam sebuah film selalu berada dalam posisi yang tertindas atau kalah oleh laki-laki, baik secara logika maupun emosional (Suwandi, 2008:63). Stereotipe mengenai perempuan masih melekat dalam pikiran masyarakat termasuk dalam industri media massa (Siregar, dkk., 1999:5). Sunarto (dalam Puspitasari, 2013) mengungkapkan hal yang sama, yakni

'Perempuan dalam media massa selalu digambarkan sangat tipikal, tempatnya adalah di rumah, berperan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, bergantung pada pria, tidak mampu membuat keputusan penting, hanya terlibat pada sejumlah profesi saja, selalu melihat kepada dirinya sendiri, sebagai objek seksual/symbol seks,

sebagai objek peneguhan pada pola kerja patriarki, objek pelecehan dan kekerasan, menjadi korban tetapi sebenarnya diposisikan salah, bersikap pasif, merupakan konsumen barang dan jasa, dan sebagai alat pembujuk.’

Penyebab utama dalam hal ini tidak lain ialah masyarakat masih terus menganut ideologi patriarki yang selalu memprioritaskan kepentingan laki-laki dan mengesampingkan kepentingan perempuan (Puspitasari, 2013). Menurut Suwandi (2008:64) wanita dalam media film hanya dijadikan sebagai pendamping suami, walaupun ada wanita yang menduduki posisi penting, itu terjadi apabila sang wanita memiliki akses dengan penguasa serta berpendidikan tinggi. Dalam media massa seringkali posisi perempuan ini menjadi sangat potensial untuk dikomersialkan dan dieksploitasi, karena posisi perempuan menjadi sumber inspirasi dan juga tambang uang yang tak akan habis-habisnya (Bungin, 2009: 355). Seringkali media melakukan bias dalam menampilkan representasi perempuan di dalam media, baik cetak maupun elektronik, yang mana perempuan digambarkan sebagai objek, simbol seks, atau justru korban kekerasan (Sastriyani, 2008: 522).

Selain itu adapun penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2013) yang mengungkapkan bahwa dalam film-film animasi seperti *barbie*, *snow white*, *the princess* sering kali menampilkan konten perempuan yang digambarkan sebagai putri-putri yang tidak berdaya dan selalu tergantung pada kekuatan yang dimiliki kaum lelaki. Hal ini membuktikan posisi perempuan selalu tidak menguntungkan dengan melekatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yanuar (2014) juga menjelaskan beberapa film Indonesia yang dirilis pada tahun 2000, seperti *ayat-ayat cinta* dan *berbagi suami* menampilkan hal yang

serupa. Perempuan masih menjadi komoditas utama dari film tersebut untuk dijual kepada masyarakat.

Siregar, dkk (1999:435) menjelaskan ‘pada umumnya perempuan diberi peran dan diposisikan untuk berkiprah dalam lingkup domestik atau rumah tangga sedangkan laki-laki di lingkup publik atau masyarakat’. Pernyataan ini masih selalu kita jumpai dalam adegan pada sebuah film atau sinetron. Dengan kata lain media massa merupakan salah satu akses penyampaian pesan-pesan mengenai ketidakadilan gender yang sering kali terjadi pada perempuan meskipun paham feminisme telah ada sejak lama (Puspitasari, 2013). Hal serupa juga disampaikan oleh Siregar, dkk (1999:87) bahwa ‘konstruksi nilai-nilai gender patriarki yang dominan dalam masyarakat hingga sekarang ini membuat media juga cenderung beradaptasi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dominan ini.’ Dalam konteks perempuan, terkadang muncul dengan bentuk yang lebih keras dan keluar dari stereotip perempuan sebagai sosok yang lembut dan tak berdaya yang mana sosok perempuan tersebut hanya dapat ditemui di dalam media massa (Bungin, 2009: 355).

Oleh karena itu, gerakan kaum perempuan sangat mengharapkan media massa seharusnya dapat menjadi agen untuk menyuarakan gerakan adil gender dan disosialisasikan pada masyarakat (Siregar, dkk., 1999:88). Hal ini kemudian dibuktikan dengan kemunculan berbagai film mengenai perempuan di era 90-an yang menggambarkan kaum perempuan lebih aktif, mandiri serta sepadan dengan laki-laki (Puspitasari, 2013). Dalam Puspitasari (2013) dijelaskan ada beberapa film yang berusaha menonjolkan sisi positif dari perempuan, diantaranya kemunculan film *sex and the city* (1998) menampilkan sosok perempuan *single* (tidak memiliki pasangan) namun memiliki kemandirian secara ekonomi, serta film lain

berjudul *Charlie angels* (2000) yang menceritakan empat orang wanita tangguh, agresif namun sangat pandai.

Tidak hanya itu, dalam dunia perfilman Indonesiapun mulai ditampilkan hal serupa yang mana kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih baik serta mengangkat harkat perempuan. Kuswandi (2008:64) menjelaskan beberapa judul film tersebut, diantaranya ialah Aksara Tanpa Kata yang mendapat sambutan hangat masyarakat Indonesia serta berhasil meraih piala Vidia tahun 1992. Selain itu adapun film lain seperti, Perempuan, Siti Nurbaya, Bukan Perempuan Biasa, serta Cut Nyak Dien yang turut meramaikan perfilman Indonesia dengan menggambarkan figur wanita yang memiliki potensi.

Selain itu dalam Yanuar (2014) juga disebutkan sebuah film berjudul bidadari-bidadari surga yang hadir pada tahun 2012, menceritakan sosok seorang perempuan mandiri yang harus bekerja untuk menghidupi ibu dan keempat saudaranya. Yanuar mengatakan film ini ingin mengangkat sisi positif dari seorang perempuan bahwa perempuan juga sebenarnya memiliki kemampuan serta kekuatan seperti kaum lelaki. Film yang diperankan oleh aktris Nirina Zubir ini, secara tidak langsung ingin memunculkan sebuah stereotipe baru dalam masyarakat bahwa perempuan yang ideal dan positif itu sama halnya seperti laki-laki dengan sifat maskulinnya.

Dengan demikian, menurut Kuswandi (2008:65) kehadiran film-film tersebut, secara tidak langsung memberikan gambaran jelas bahwa bentuk kesetaraan gender dapat terwujud apabila disampaikan dan disosialisasikan dengan baik. Selain itu peran kaum perempuan dalam dunia media massa sebenarnya dapat dikembangkan ke dalam wacana yang lebih luas lagi sehingga perempuan tidak hanya dijadikan objek cerita saja tetapi

dapat berperan menjadi subjek cerita baik itu dalam film, sinetron maupun program acara televisi lainnya.

### **II.3. Pembagian Kerja antara Suami-Istri dalam Keluarga**

Pernikahan tentunya menjadi dambaan bagi setiap pasangan laki-laki dan perempuan dewasa. Sebuah hubungan dalam rumah tangga akan diwarnai dengan berbagai peran baru yang nantinya dijalani oleh kedua belah pihak yakni laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri (Purbasari & Lestari, 2015).

Umumnya tugas dan peran yang dijalankan dalam rumah tangga justru masih selalu berpatokan pada anggapan masyarakat mengenai budaya patriarki, yakni laki-laki bertugas mencari nafkah di luar rumah dan perempuan fokus dalam pekerjaan rumah tangga. Seperti yang diungkapkan oleh Siregar, dkk (1999:170) perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai sebuah kodrat sehingga stereotipe bahwa perempuan itu lemah, hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam rumah tangga baik sebagai istri maupun seorang ibu masih terus melekat dalam pikiran masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan peran seorang perempuan tidak terlepas dari urusan pekerjaan dalam rumah semata. Arief Budiman (dalam Siregar, dkk., 1999:436) mengatakan

‘Wanita kemudian menjadi tergantung kepada laki-laki bukan saja secara ekonomis, tetapi juga secara psikologis. Banyak wanita yang kemudian percaya bahwa perkawinan adalah tempat satu-satunya bagi mereka untuk menyelamatkan hidupnya, karena perkawinan dapat memecahkan masalah ketergantungan ekonomis dan psikologis mereka. Ini memang merupakan hasil yang wajar dari suatu keadaan sosial yang demikian.’

Tetapi, pada kenyataannya yang terjadi ialah pernikahan justru membuat wanita menjadi terkekang dalam menentukan kebebasannya terutama dalam hal pekerjaan. Murniati (2004:62-63) menyatakan bahwa

‘perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan mengembangkan diri menjadi manusia yang berpribadi utuh. Untuk mengembangkan ke arah itu, perempuan dan laki-laki dapat bekerja sama saling mengembangkan diri melalui relasi dalam bekerja. Saling ketergantungan antara laki-laki dan perempuan diwujudkan dalam bentuk *partner relationship* yang hubungannya horisontal bukan vertikal (hubungan kekuasaan).’

Merujuk pada apa yang disampaikan oleh Murniati, maka perempuan seharusnya dapat melakukan pekerjaan di luar rumah layaknya laki-laki. Namun, yang masih menjadi persoalan utama ialah pandangan masyarakat mengenai perempuan dan karier. Perempuan yang memilih untuk berkarier masih dipandang sebagai kelompok perempuan, bukan dipandang sebagai pribadi manusia yang memiliki kemampuan tertentu (Murniati, 2004:218).

Lebih lanjut, Murniati menyatakan masih banyak ditemui dalam masyarakat tentang nasehat bagi perempuan yang berkarier bahwa perempuan tidak boleh meninggalkan tugas keluarga, memelihara dan mendidik anak. Oleh karena itu, apabila terjadi permasalahan yang berimbas pada keutuhan hubungan dalam keluarga maka semua orang akan melimpahkan kesalahan kepada perempuan. Selain itu, Latifatun (2015) menambahkan dampak negatif dari perempuan sebagai istri yang bekerja di luar rumah ialah semakin meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Waktu mereka lebih banyak mengurus pekerjaan di luar rumah, sehingga pekerjaan dalam rumah tangga termasuk mengurus anak-anakpun terabaikan. Sama halnya seperti dijelaskan oleh Gardiner, dkk (1996:219) yang mana masyarakat Indonesia selalu mengaitkan kesejahteraan keluarga dengan peranan seorang ibu. Apabila ada perempuan yang memilih untuk

berkarier dan keluarganya dalam kondisi tidak ideal maka yang terjadi ialah masyarakat tidak segan untuk menghakimi perempuan yang berkarier sebagai perempuan yang gagal.

Sebuah penelitian yang dilakukan Anggraeni (2012), mengatakan ketentuan pembagian kerja dalam keluarga juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Apabila suatu kebudayaan menetapkan suami mempunyai kekuasaan lebih besar dalam perkawinan, maka hal tersebut akan berdampak pada kekuasaan daripada perbandingan sumber daya yang dimiliki oleh keduanya. Sementara itu, apabila kebudayaan mendukung pandangan yang sederajat, maka kekuasaan tidak harus selalu dimiliki oleh para lelaki sebagai suami, sehingga bisa jadi dalam hal pembagian kerja dilakukan secara sama rata.

Sementara itu, Duffy dan Atwater (dalam Latifatun, 2015) mengatakan 'pekerjaan merupakan salah satu konflik pada pasangan suami-istri yang dapat mengurangi keharmonisan.' Oleh karena itu ketika ingin masuk dalam dunia karier, perempuan seolah selalu menoleh ke belakang, mendengar setiap komentar dari masyarakat yang lebih banyak berasumsi negatif karena tidak bekerja sesuai kodrat perempuan (Murniati, 2004:220). Hal serupa juga dikatakan Nugroho (dalam Dewi & Sadhan, 2013) bahwa dampak dari keterlibatan wanita bekerja adalah terjadinya konflik antara kebutuhan untuk pengembangan diri dalam karier dengan nilai-nilai tradisional yang melekat pada wanita yaitu bertanggung jawab dalam tugas-tugas rumah.

Pekerjaan di luar rumah tentu menjadi momok yang menakutkan bagi pasangan suami-istri terutama bagi seorang istri. Menurut Siregar, dkk (1999:187) sikap egois tiba-tiba muncul ketika pekerjaan dalam rumah tangga belum terselesaikan, terlebih bagi pasangan yang sama-sama

memiliki pekerjaan, sementara diantara keduanya justru saling mengharapkan salah satu dengan sukarela mau membereskan. Pada saat seperti ini, laki-laki sebagai suami justru menuntut istri untuk bertanggungjawab atas urusan keluarga karena hal tersebut sesuai dengan budaya patriarki bahwa sektor domestik memang menjadi urusan istri. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi demikian hal yang paling diperlukan oleh keduanya ialah rasa saling mengerti. Sebagaimana dikatakan oleh Supriyantini (2002) sebuah perkawinan merupakan suatu proses penyatuan antara laki-laki dan perempuan sehingga diperlukan sikap saling pengertian yang harus disadari betul oleh kedua belah pihak. Selain itu salah satu syarat penting dalam membangun sebuah hubungan pasangan suami-istri ialah faktor psikologis yang meliputi; kematangan emosi, pikiran, saling toleran terutama saling membantu dalam hal pekerjaan.

Menurut Ratih Anggraeni (2012) dalam penelitiannya menjelaskan tipologi keluarga Indonesia dalam kaitannya dengan pola pembagian kerja rumah tangga terbagi atas beberapa kelompok, antara lain;

1. Keluarga yang membagi pekerjaan secara baku atau tradisional. Keluarga ini lebih memegang prinsip budaya patriarki, yang mana perempuan diberikan tugas untuk melahirkan anak, membesarkan, mengasuh, serta mengurus rumah tangga. Sedangkan laki-laki hanya fokus dengan pekerjaan di luar rumah.
2. Keluarga yang membagi pekerjaan secara cair atau tidak ketat. Keluarga tipe ini bisa dikatakan termasuk keluarga dengan pemikiran modern, sehingga tidak menjadi masalah apabila seorang lelaki ikut ambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga begitupun sebaliknya perempuan yang bebas menjalani pekerjaan di ranah publik.

3. Keluarga yang membagi pekerjaan secara cair dan baku. Keluarga tipe ini masih cenderung memegang bentuk baku, namun di sisi lain sudah mengarah ke bentuk cair. Perempuan tetap menjalani perannya mengurus keluarga dan rumah tangga namun ia tetap memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan pekerjaan di luar rumah.

Ratih Anggraeni (2012) kemudian mengungkapkan kelompok keluarga urutan ke dua dan tiga saat ini sudah semakin banyak bermunculan terutama pada kota-kota besar. Hal ini tentu saja membutuhkan rasa toleransi diantara ke duanya terutama untuk saling membantu. Seperti yang disampaikan Supriyanti (2002) bahwa dalam kaitannya dengan saling membantu antara pasangan suami-istri, maka keduanya perlu melakukan diskusi dan kompromi yang matang agar urusan saling membantu dalam hal pekerjaan dapat dijalankan secara bersama. Kompromi yang harus dilakukan yakni mengenai keterlibatan keduanya dalam pekerjaan rumah tangga, terutama keterlibatan suami dalam mengasuh dan mengurus anak-anak ketika di rumah. Hal ini dilakukan agar suami juga ikut merasakan pekerjaan yang selama ini selalu identik dengan perempuan.

Selain itu, Supriyanti juga menegaskan, keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga setidaknya menghindarkan konflik-konflik diantara kedua belah pihak. Grosenth (dalam Supriyanti, 2002) melakukan penelitian terhadap 16 orang pasangan suami-istri yang memiliki keterlibatan yang sama dalam pekerjaan rumah tangga. Hasilnya, suami yang ikut merawat dan mengasuh anak-anak merasa lebih baik dan terbuka dengan anak-anaknya sehingga anak-anakpun akan bertumbuh dengan penuh kemampuan serta kepercayaan diri yang tinggi, yang berdampak pada pergaulannya dengan lingkungan sosial.

Adapun Idris Abdusshomad (dalam Ratih Anggraeni, 2012) menjelaskan seharusnya para suami tidak perlu enggan dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga, seperti mengasuh anak hingga mengurus keperluannya sendiri. Hal ini tidak akan menurunkan kualitas kewibaannya sebagai seorang lelaki di mata istri, justru ini akan menjadi suatu penghormatan dan timbul rasa bangga dari istri. Hadirnya suami berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi kelangsung rumah tangga. Seperti yang dikatakan Supriyantini (2002) bahwa 'ketika suami ikut ambil bagian dalam urusan tangga dirasakan akan membawa kenyamanan serta meningkatnya kebersamaan terutama bagi keluarga muda yang memiliki karier ganda.'

Sobur dan Septiawan (dalam Supriyantini, 2002) mengatakan peranan suami dalam urusan pekerjaan rumah tangga dianggap sangat penting karena dapat membantu menyelamatkan istri dari kelebihan peran apalagi jika sang istri adalah wanita karier. Minimal istri merasa sangat terbantu karena perhatian dari suami, sementara bagi suami sendiri ada nilai kemandirian yang didapat ketika berhadapan langsung dengan terlibat dalam pekerjaan rumah tangga.

Dilain pihak, Dewi dan Sudhana (2013) mengatakan keikutsertaan perempuan dalam pekerjaan di luar rumah tidak selalu berakhir negatif (keretakan rumah tangga). Surya (dalam Dewi & Sudhana) menjelaskan bahwa tidak jarang wanita yang bekerja cukup sukses dalam membina rumah tangga, dengan karier yang dimiliki istri dapat menunjang kebahagiaan dan kemajuan bagi rumah tangganya, karena secara ekonomi dengan bekerja dapat membantu kelangsungan hidup keluarga secara finansial.

Ratih Anggraeni (2012) mengungkap fakta baru bahwa dengan kemajuan industri saat ini membuat masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan sehingga membuat adanya perubahan pembagian kerja dalam keluarga, yakni keikutsertaan para istri dalam ranah publik. Ratih menjelaskan hal ini juga berdampak pada perubahan ideologi yang selama ini dianut dalam masyarakat dengan dibuktikan munculnya fenomena baru yang mana para suami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sementara istri melakukan pekerjaan di luar rumah.

Seorang ahli bernama Talcoltt Parsons (dalam Ratih Anggraeni, 2012) mengatakan industrialisasi yang terjadi justru memicu dampak positif bagi kehidupan dalam keluarga dengan bergesernya pandangan tradisional. Parsons menjelaskan sebelum adanya industrialisasi, maka pandangan tradisional dalam keluarga bersifat *a segregated conjugal role-relationship* (hubungan peran konjugal yang tersegregasi), yakni adanya pembagian peran yang jelas antara suami dan istri terutama pemisahan kerja pada ranah publik dari para istri. Parsons melanjutkan, dengan semakin kuatnya industrialisasi dan terbukanya kesempatan kerja, maka pandangan tersebut kemudian berubah menjadi *a joint conjugal role-relationship* (hubungan peran konjugal bersama), yakni suami-istri melakukan aktivitas rumah tangga bersama serta membuat dan merencanakan suatu keputusan bersama.

Kemudian hal lain yang dijelaskan oleh Ratih Anggraeni dalam penelitiannya, bahwa suami yang memiliki istri bekerja tentu akan lebih bijak dalam bertindak terkait dengan posisi istri yang juga merupakan sumber penghasilan bagi keluarga. Terlibatnya istri dalam urusan pekerjaan publik tentu memiliki tempat tersendiri, yang mana istri juga memiliki kontribusi dalam menghasilkan sumber daya ekonomi keluarga.

Dengan demikian Surya dalam penelitian oleh Dewi dan Sudhana (2013) menambahkan, hal terpenting bagi seorang perempuan sebagai istri ketika hendak berkarier di luar rumah ialah melakukan penyesuaian antara diri dan pekerjaan serta perlunya mendapat dukungan dari keluarga terutama suami dan anak-anak. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan komunikasi interpersonal diantara keduanya sehingga tidak harus mengorbankan keutuhan rumah tangga.

#### **II.4. Analisis Penerimaan (*Reception Analysis*)**

Kehadiran media massa tentu semakin mempermudah kehidupan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Tak dapat dipungkiri perkembangan teknologi komunikasi membawa dampak perubahan bagi masyarakat luas (Kuswandi, 2008:33). Hadi (2009) mengatakan ‘studi mengenai hubungan yang terjadi antara media dan khalayak (pembaca, pemirsa, pengguna internet) menjadi perhatian utama antara industri media, akademisi, maupun pemerhati media dan masalah sosial.’ Sebagai khalayak yang menggunakan media, kita dituntut agar dapat mencerna dengan baik isi pesan yang disampaikan dalam media yang dimaksud (Trianton, 2013:36).

Media massa memiliki kekuatan besar dalam fungsinya mempersuasi atau memengaruhi kita sebagai khalayak. Nurudin (2011:72) mengatakan ‘apa yang dilihat, didengar, dan dibaca khalayak di media, didesain untuk memengaruhinya.’ Nurudin menambahkan terdapat ratusan film dibuat di Amerika setiap tahunnya berhubungan dengan informasi dan khususnya persuasif. Devito (dalam Nurudin, 2011:72-73) menjelaskan bahwa fungsi persuasi merupakan fungsi yang paling penting dari komunikasi massa. Persuasi dalam hal ini bisa datang dari berbagai macam

bentuk, seperti (1) mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang, (2) mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang, (3) menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu dan (4) memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu.

Hadi (2009) menuturkan ‘isi media mampu menjadi wacana perbincangan (penerimaan khalayak) yang menarik apabila dikaitkan dengan konteks budaya.’ Sebagai salah satu contoh efek dramatisasi yang ditampilkan dalam sebuah film dapat membuat pemirsa atau penonton mengkonstruksi makna sesuai dengan teks dan konteks. Selanjutnya, Hadi menjelaskan standar yang digunakan untuk mengukur khalayak media ialah menggunakan *reception analysis* yang mana analisis ini berusaha memberikan makna atas pemahaman teks media baik itu media cetak, elektronik, maupun internet.

Oleh karena itu, studi mengenai penerimaan khalayak dianggap tepat untuk mengetahui respon khalayak terkait pesan teks yang disampaikan media. Adapun enam ciri utama penerimaan dalam penelitian khalayak, yang dapat disimpulkan sebagai berikut (McQuail, 2011:153) :

- a. Teks media harus dibaca melalui persepsi khalayak yang membangun makna dan kesenangan dari teks media yang ditawarkan.
- b. Proses penggunaan media dan cara di mana hal ini diungkapkan dalam konteks tertentu merupakan objek kepentingan yang utama.
- c. Penggunaan media umumnya adalah dalam situasi yang spesifik dan berorientasi pada tugas sosial yang berkembang dari partisipasi di dalam komunitas interpretative.

- d. Khalayak untuk genre media tertentu sering kali terdiri atas komunitas interpretative yang terpisah dan memiliki wacana serta kerangka yang sama untuk memaknai media.
- e. Khalayak tidak pasif atau semuanya adalah anggota yang setara karena terdapat beberapa yang lebih berpengalaman atau lebih aktif daripada yang lain.
- f. Metode penelitian haruslah kualitatif dan mendalam.

Oleh karena itu dari beberapa ciri di atas, maka proses pemaknaan isi teks media membutuhkan partisipan dari khalayak yang dalam hal ini bersifat aktif. McQuail (2011:144) berpendapat khalayak merupakan sebuah kata yang sangat identik sebagai istilah dari penerima dalam model urutan sederhana dari proses komunikasi (sumber, saluran, pesan, penerima, efek) yang dilakukan oleh para pelopor pada bidang penelitian media. McQuail menjelaskan 'konsep khalayak menunjukkan adanya sekelompok pendengar atau penonton yang memiliki perhatian, reseptif, tetapi relatif pasif.'

Hadi (2009) mengatakan konsep terpenting dalam studi *reception analysis* terletak pada pemaknaan yang diciptakan dalam interaksi antara khalayak (penonton dan pembaca) dan teks. Singkatnya, makna diciptakan karena menonton atau membaca dan memproses teks media. Khalayak dituntut sebagai pihak yang memiliki kekuatan dalam menciptakan makna secara bebas dan bertindak atau berperilaku sesuai dengan makna yang mereka ciptakan atas teks media tersebut. Hadi melanjutkan, oleh karena itu dalam studi *reception* ini, khalayak yang dipilih ialah khalayak aktif. Artinya khalayak merupakan partisipan aktif dalam publik yang ikut ambil bagian dalam diskusi atas isu-isu mengemuka yang ditampilkan dalam media.

Sesuai dengan ketentuannya bahwa pemilihan khalayak dalam metode *reception analysis* merupakan khalayak aktif, maka Biocca pada tahun 1988 (dalam McQuail, 2011:164-165) mengemukakan beberapa karakteristik dalam penentuan khalayak aktif. Pertama selektivitas, khalayak dalam hal ini dinilai sebagai khalayak aktif yang selektif dalam memilih berbagai media yang akan mereka gunakan. Kedua utilitarianisme, di mana khalayak dianggap memiliki kepentingan pribadi dalam mengkonsumsi isi teks media. Ketiga khalayak memiliki tujuan tertentu dengan mengkonsumsi isi media berdasarkan pengalaman hidup. Keempat kebal terhadap pengaruh, khalayak yang memegang kendali sehingga tidak mudah terpengaruh oleh terpaan isi teks media, dan kelima keterlibatan, yang mana khalayak dinilai selalu aktif terlibat dalam pengalaman media secara terus-menerus.

Fokus dari studi *reception analysis* pada dasarnya ialah bahwa khalayak sebagai partisipan aktif dalam proses membangun dan menginterpretasikan makna atas apa yang didengar, dibaca, dan dilihat sesuai dengan konteks budaya (Hadi, 2009). Hall (Baran & Davis, 2010:304) menjelaskan salah satu ciri utama dalam penerimaan khalayak ialah isi. Menurut David Morley (dalam Sakina, 2012) *reception analysis* lahir atas dua pandangan yakni *what the media do to the people dan what people do with media*. Lebih jelasnya, makna pandangan pertama ialah apa yang dilakukan media pada khalayak yang berarti ada kekuatan pesan pada khalayak dan menekankan efek media itu sendiri. Pandangan kedua berarti, apa yang dilakukan khalayak pada media. Pandangan ini berasumsi bahwa penggunaan media yang beragam pada khalayak yang berbeda dalam latar belakang dan konteks sosial penerimaan mereka akan menghasilkan pemaknaan media yang berbeda pula (Sakina, 2012).

Studi mengenai penerimaan khalayak mulai berlangsung sejak tahun 1930 yang dibuktikan dengan penelitian efek isi media massa pada sikap publik, yang mana media massa merupakan kekuatan besar untuk memengaruhi khalayak yang dianggap pasif (Hadi, 2009). Dilihat dari perkembangannya, menurut Alasutari (dalam Davereux, 2003:139-141) studi mengenai penerimaan tentunya mengalami perputaran teori serta melahirkan tiga paradigma, yakni paradigma *encoding-decoding*, paradigma *ethnography*, serta yang terbaru ialah paradigma *constructionist approach*. Pertama paradigma *encoding-decoding* dijelaskan memiliki pengaruh besar pada awal perkembangan metode penerimaan khalayak.

Adapun Purbayanti (2011) mengatakan makna ‘dalam penerimaan khalayak ialah dari teks terletak antara si pembuat teks atau encoder (komunikator atau professional media) dengan penerima teks atau decoder (pembaca, pendengar, atau penonton).’ Ini secara langsung membuktikan bahwa penelitian khalayak menurut Stuart Hall mempunyai perhatian pada analisis konteks sosial dan politik yang mana isi media diproduksi (encoding) dan konsumsi isi media (decoding) dalam kehidupan sehari-hari (Baran & Davis, 2010:303).

Semua konten media dapat dianggap sebagai teks yang terdiri atas lambang-lambang yang sangat terstruktur. Oleh karena itu untuk mengartikan sebuah teks, maka khalayak harus menafsirkan lambang dan struktur secara keseluruhan sehingga dapat memaknainya dengan utuh. Sesuai dengan prinsipnya yakni memaknai isi media dalam kehidupan sehari-hari, fokus penelitian khalayak juga berpengaruh terhadap dua hal penting lainnya, (1) *field of experience* dan (2) *frame of reference* (Mirawati, 2014).

Sri Moerdijati (2012:43-44) mengatakan ‘setiap manusia memiliki *field of experience* (bidang pengalaman) artinya segala sesuatu yang dialami sendiri dan *frame of reference* (kerangka acuan) yaitu segala yang tidak dialami sendiri.’ Oleh karena itu meskipun pembuat teks telah memproduksi isi media dengan cara tertentu, tetapi pembaca akan memahaminya dengan cara yang berbeda sesuai dengan *field of experience* dan *frame of reference*.

Setelah memaknai isi pesan yang ditampilkan oleh media, maka Hall (dalam Baran & Davis, 2010:304-305) membagi khalayak dalam beberapa posisi diantaranya, posisi dominan, negosiasi, dan oposisi. Pertama, posisi dominan atau pemahaman yang disukai, dinilai sebagai posisi yang menerima, sepakat atau mendukung secara penuh terhadap isi pesan yang disampaikan oleh media tersebut. Posisi ini memberikan kebebasan seluasnya kepada khalayak untuk sepakat dengan pesan yang disampaikan oleh teks media. Kedua, posisi negosiasi yakni posisi yang bisa saja menerima dan bisa saja menolak pesan yang disampaikan oleh sebuah media, namun harus disertai dengan alasan-alasan tertentu. Ketiga ialah posisi oposisi, yakni posisi yang menolak secara penuh terhadap isi dari media yang diterimanya sehingga khalayak dalam posisi ini membangun penafsiran konten yang sama sekali berlawanan dari pemaknaan dominan.

Kedua, paradigma *etnography*. Menurut Alasuutari (1999) (dalam Devereux, 2003:140-141) paradigma ini terdiri dari tiga kunci utama terkait ciri penonton *etnography*. Pertama paradigma ini dipengaruhi oleh perspektif feminis. Kedua, konsentrasi dari awal pada isi dan penerimaan teks media berkaitan dengan model *encoding-decoding* sehingga memberikan kebebasan bagi khalayak untuk memilih jenis media yang lebih spesifik dalam penggunaan setiap harinya. Ketiga fase penonon

*ethnography* menempatkan penekanan baru pada pemahaman penerimaan dalam konteks setiap harinya.

Ketiga, paradigma *constructionist approach* merupakan paradigma baru dalam penelitian penerimaan. Pemahaman konstruksionis atas khalayak media memiliki penekanan pada penerimaan yang tidak terbatas pada media oleh khalayak tertentu yang mana hal tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh paradigma *encoding-decoding* dan *ethnography* (Devereux, 2003:141). Dalam paradigma yang ketiga ini, Devereux melanjutkan pembahasan dalam program dan pemrograman, namun tidak berkaitan dengan studi teks dalam penggunaannya sehari-hari. Alasutari (dalam Devereux, 2003:141) menjelaskan bahwa dalam *paradigma constructionist* telah terjadi pergeseran dari penekanan pada psikologi penonton ke sosiologi penonton. Dalam model konstruksionis ini, penerimaan penonton lebih diarahkan untuk fokus terhadap konteks sosial dan diskursif yang lebih luas di mana saat penerimaan itu berlangsung.

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai perkembangan tiga paradigma dalam studi penerimaan, maka peneliti memutuskan untuk memilih paradigma *encoding-decoding* dengan membaginya menjadi tiga macam kode atau posisi yaitu dominan, negosiasi, dan oposisi. Pemilihan paradigma *encoding-decoding* ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan berdasarkan rumusan masalah yang ada, dengan melihat seperti apa pemaknaan dari masing-masing informan dalam hal ini ialah pasangan suami-istri.